

ABSTRAK

Kasanah, Anisatul. 2017. NIM. 2822133004. *Pendaftaran Tanah Hasil Redistribusi dari TNI AD (Studi Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban) menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Hukum Islam*. Pembimbing Indri Hadisiswati, SH.,MH.

Kata Kunci : Pelaksanaan Sertifikasi, Tanah Redistribusi.

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sengketa tanah yang terjadi di perkebunan Kaligentong, karena perebutan hak atas tanah. Sertifikasi hak milik atas tanah merupakan hal yang penting dalam mewujudkan efektifitas pelaksanaan redistribusi, maka diperlukan pengawasan yang ketat. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan dalam sertifikasi tanah sehingga terjamin kepastian hukum. Proses redistribusi pada penelitian ini adalah dimana tanah-tanah sebelumnya merupakan tanah partikelir milik perusahaan Belanda yang di Nasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. Tanah bekas partikelir tersebut, kemudian dibagikan kepada para petani penggarap yang telah melakukan sewa-menyewa secara turun-temurun.

Berdasarkan hal diatas, ada tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana proses pendaftaran tanah hasil redistribusi dari TNI AD, *kedua*, bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan yang *ketiga* adalah bagaimana redistribusi dan pendaftaran tanah menurut hukum islam. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses redistribusi, proses pendaftaran, sampai dengan sertifikat hak milik diserahkan kepada pemohon dengan ditinjau Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.

Skripsi ini bermanfaat bagi warga perkebunan Kaligentong khususnya, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perolehan hak milik atas tanah melalui permohonan pengadaan tanah redistribusi.

Metode Penelitian ini dengan mengambil sumber data primer dan skunder. Data primer dengan mengadakan penelitian secara langsung ketempat obyek penelitian yaitu Warga Desa Kaligentong yang mendapatkan tanah redistribusi, Brigif 16/Wirayudha Kodam V/Brawijaya, dan BPN Tulungagung. Sedangkan data skunder dengan penelitian kepustakaan, mencari berbagai bahan dan informasi yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu tentang proses redistribusi tanah hingga sertifikasi hak milik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi sekarang, dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat. Setelah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di Desa Kaligentong dan anggota TNI AD, kemudian peneliti memperoleh data dari wawancara,

selanjutnya menjabarkan maksud dari hasil wawancara tersebut kemudian dibahas dengan prosedur Badan Pertanahan Kabupaten Tulungagung dan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis karena mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor-faktor sosiologis terhadap faktor-faktor yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa:

1. Proses redistribusi dari TNI AD atas permohonan masyarakat perkebunan Kaligentong sudah tepat sasaran.
2. Pendaftaran tanah pada praktek sudah memenuhi ketentuan Undang-undang yang mengatur yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, karena terbentuk panitia pendaftaran tanah yang menangani sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Proses redistribusi dan pendaftaran tanah sudah benar menurut hukum islam.

ABSTRACT

Khasanah, Anisatul. 2017. NIM. 2822133004. *The result of a redistribution of land registration from Army (Kaligentong Village Study, Pucanglaban Sub-District) according to Government regulation No.24 of 1997 and Islamic law.* Advised by Indri Hadisiswati, S.H., M.H.

Keywords : Certification implementation, Redistribution land.

The background of this research is by land dispute that happened in Kaligentong estate because of the struggle of the land right. The certification of the land own right is the important thing in creating the efectivity of the redistribution implementation, so it is needed tight control. The government is demanded to give service in the land certification so that proven law certainty. Process of redistribution of this research is where the lands before is private land owned by Holland's company that nationalized by Indonesian government after the validity main laws of agraria. The ex private land, then divided to the worker farmers that have done the rent hereditary.

Based on the things above, there are three matters in researching is the first, how the process of the registration the redistribution result from TNI AD, the second, how the observation PP No. 24 of 1997 about land registration, and the third, is how the redistribution and land registration based on the Islamic law. As for the purpose of this research is to explain redistribution process, until own right certification is given to the appellant with observed PP No. 24 of 1997.

This research is benefit for Kaligentong estate people especially, as the thinking contribution in creating and increasing the result quality of land own right by the request of the holding land redistribution.

The method of this research by taking source of the primary and secondary data. Primary data by holding the research directly to the place of research object is Kaligentong people that getting redistribution land, Brigif 16/ Wirayudha Kodam V/Brawijaya, and BPN Tulungagung. While the secondary data by literature research, searching some matters and informations that related with research object is about the process of land redistribution until the certification of own right. This research is descriptive research, is the research that try to describe the indication phenomenon, or the event that happen now, with the purpose describing systematically, factual, and accurate. After doing interview to some people in Kaligentong village and the member of TNI AD, then the researcher got the data from interview result than explained with the procedure of BPN Tulungagung and the certainty of the valid laws. The research used sosiological yuridical approach because remembering the matter that examined is about the relation between sosiological factors to the yuridical factors.

Based on the result of this research can be known that:

1. Redistribution process from TNI AD on the Kaligentong estate people request is appropriate,
2. The land registration to the practice has full fill the laws certainty that manage PP No.24 of 1997, because the form of the committee land registration that doing as that procedure,
3. Redistribution process and land registration is right based on the Islamic law.